

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT
DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI *JAKARTA ISLAMIC INDEX*
(JII) TAHUN 2016-2021**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh:

ELSA RAHMA PRAMESWARI

NIM 1805046036

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elsa Rahma Prameswari

NIM : 1805046036

Jurusan : Akuntansi Syariah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi mengenai materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Dengan demikian, skripsi ini juga tidak berisis mengenai pikiran-pikiran orang lain, kecuali adanya informasi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Desember 2022

Deklator



Elsa Rahma Prameswari

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp. /Fax (024) 7601291,
Semarang 50185

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Intensitas Modal terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) Tahun 2016-2021.

Penulis : Elsa Rahma Prameswari

NIM : 1805046036

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam UIN Walisongo dan dinyatakan LULUS pada tanggal:

28 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 28 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Drs. Saekhu, M.H.

NIP. 196901201994031004

Sekretaris Sidang,

Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., A.

NIP. 197912222015032001

Penguji Utama I,

Arif Afendi, S.E., M.Sc.

NIP. 198505262015031002



Penguji Utama II,

Suhirman, S.H.L., MA, Ek.

NIP. 198412122019031010

Pembimbing I,

Dessy Noor Farida, S.E., M.Si., A.

NIP. 19791222201032001

Pembimbing II,

Sentiana Na'afi, S.H., M.S.I.

NIP. 198909242019032018

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas setiap keadaan dalam memberikan rahmat-Nya berupa kesehatan, kesabaran, dan kemudahan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Tak lupa haturkan shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada tauladan dan junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita dan seluruh kaum muslimin mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dan dengan setulus hati penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Rismanto dan Ibu Umi Jamiatun yang telah menjadi *support system* pertama dalam segala hal. Beliau yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menjalani perjalanan panjang hingga menempuh pendidikan tinggi, karena beliau telah bekerja keras dan tidak pernah lelah dalam menjalaninya serta selalu memberikan doa, dukungan, nasihat dan juga semangat yang selalu tercurahkan untuk penulis. Terima kasih telah mewujudkan salah satu mimpi dari penulis. Semoga Allah selalu menjaganya dan menjadikan semua pengorbanannya sebagai amal dan pahala yang terus mengalir padanya. Aamiin.
2. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan selama ini.
3. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
4. Sahabat dan teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa.

MOTTO

“Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga akan lupa betapa pedihnya rasa sakit”

(Ali bin Abi Thalib)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan sesuatu yang mendasar dalam sebuah skripsi, mengingat dalam keseharian banyak ungkapan yang menggunakan Bahasa Arab, seperti nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya, mulanya disusun menggunakan huruf Arab kemudian direplikasi menjadi huruf Latin. Transliterasi dalam penelitian ini menggunakan Surat Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor.158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Untuk menjamin konsistensi, sehingga perlu ditetapkannya suatu pedoman transliterasi sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>b</i>	-
ت	Ta'	<i>t</i>	-
ث	Śa'	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	Ha'	<i>ħa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<i>kh</i>	-
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	Zal	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	
ص	Sad	<i>ś</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab mirip dengan vokal Bahasa Indonesia, karena terdiri dari vokal tunggal, vokal monofonik, dan vokal rangkap/diftong. Vokal tunggal dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan tanda atau harakat. Berikut translasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	a
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhomah	U

Vokal rangkap atau diftong dalam bahasa Arab merupakan perpaduan harakat dan huruf, berikut translasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

3. Syaddah (Tasydid)

Dalam tulisan Arab, *Syaddah* disimbolkan dengan tanda (ّ). Sedangkan dalam transliterasi pada huruf yang ada *syaddahnya* dibaca dengan pengulangan huruf (konsonan ganda), misalnya الطب dibaca *al-thib*.

Ta' Marbutah

Translasi *ta' marbutah* dibagi menjadi dua macam, berikut translasi dari *ta' marbutah*:

Ta', apabila dimatikan atau mendapatkan harakat sukun, literasinya ditulis. Misal *حكمة* dibaca *hikmah*.

a. Ta', apabila dirangkai dengan kata lain dan dihidupkan, atau diberikan harakat fathah, kasrah atau dhomah, maka translasinya dibaca t. Misal *زكاة النطري* dibaca *zakat al-fitr*.

4. Kata Sandang

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misal *الصناعة* dibaca *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat.

5. Huruf Kapital

Bahasa Arab tidak mengenal adanya penulisan huruf kapital. Dalam transliterasinya, huruf-huruf tersebut dapat diatur, terutama dalam hal penggunaan huruf kapital agar sesuai dengan pedoman umum Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital biasanya digunakan ketika menuliskan nama orang, tempat, bulan, ataupun sebagai huruf utama di awal kalimat. Apabila huruf (Al) sebelum awal kalimat, maka harus ditulis kapital. Namun, apabila menjadi judul referensi maka harus ditulis menggunakan huruf kapital. Misal, *ال غزل* dibaca *Al-Ghazali*.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2021. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dewan komisaris independen yang di proksi dengan proporsi komisaris independen, komite audit yang di proksi dengan jumlah komite audit, dan intensitas modal yang di proksi dengan rasio intensitas aset tetap. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* diproksi dengan *cash effective tax rate* (CETR).

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dengan pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan total 8 perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun. Hasil uji regresi penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Intensitas Modal, Tax Avoidance.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of independent commissioners, audit committees, and capital intensity on tax avoidance in companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) in 2016–2021. The independent variables in this study consisted of independent commissioners proxied by the proportion of independent commissioners, audit committees proxied by the number of audit committees, and capital intensity proxied by the fixed asset intensity ratio. The cash effective tax rate (CETR) is used as a proxy for tax avoidance in this study.

This research is quantitative with secondary data, and the sample was taken using the purposive sampling method with a total of 8 companies within six (six) years. The results of the regression test in this study show that the independent board of commissioners variable has no effect on tax avoidance. The audit committee has no effect on tax avoidance. The results of this study also show that capital intensity has no effect on tax avoidance.

Keywords: Independent Board Of Commissioners, Audit Committee, Capital Intensity, Tax Avoidance.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan penyayang yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Berkat karunia dan pertolongan dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Independent, Komite Audit Dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) Periode 2016-2021” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi masih terdapat banyak kekurangan, namun dengan adanya saran, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si., Akt., CA, CPA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno, SE., M.Si selaku Sekjur Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Warno, SE, M.Si selaku dosen wali.
5. Dessy Noor Farida, SE., M.Si., A selaku dosen pembimbing I dan Septiana Na’afi, S.H.,M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, arahan, dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Rismanto dan Ibu Umi Jamiatun, adik penulis, Zihni Zulfahmi dan Balqisha Lin Legini serta segenap keluarga yang tercinta lagi tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan sampai selesainya skripsi ini.
9. Sahabat serta teman terdekat penulis, teman-teman ALIEN, Salma, Nana, Damara, Jannah yang selalu memberikan support dan menjadi tempat berkeluh kesah dan meluangkan waktunya untuk kebersamaan dan berperan dalam perjalanan studi penulis.
10. Keluarga besar Akuntansi Syariah 2018 khususnya teman-teman AKS A yang telah berjuang bersama, saling membantu dan berbagi ilmu selama perkuliahan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini. Namun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini baik secara materi maupun dari penulisnya.

Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulis selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti selanjutnya. Semoga amal kebaikan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala dan keberkahan hidup dari Allah SWT.

Semarang, 15 Desember 2022

Penulis,

Elsa Rahma Prameswari

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Agensi.....	9
2.1.2 <i>Tax Avoidance</i>	11
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Hipotesis Penelitian	25
2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	25
2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	26
2.3.3 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	27
2.4 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.2 Populasi dan Sampel	30

3.3	Metode Pengumpulan Data	31
3.4	Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	31
3.4.1	Variabel Dependen.....	31
3.4.2	Variabel Independen	32
3.5	Teknik Analisis Data	33
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	33
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	33
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	35
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Hasil Pengumpulan Data.....	38
4.2	Analisis Statistik Deskriptif	39
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	40
4.3.1	Uji Normalitas.....	41
4.3.2	Uji Multikolinearitas	44
4.3.3	Uji Autokorelasi.....	45
4.3.4	Uji Heteroskedastisitas	46
4.4	Pengujian Hipotesis	47
4.4.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
4.4.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	49
4.4.3	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	49
4.4.4	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	50
4.5	Pembahasan Hipotesis	52
4.5.1	Pengaruh Dewan Komisaris Independent Terhadap <i>Tax Avoidance</i> 52	
4.5.2	Pengaruh Komite Audit Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	53
4.5.3	Pengaruh Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	54
BAB V PENUTUP		57
5.1	Kesimpulan.....	57
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	57
5.3	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020.....	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4. 1 Kriteria pemilihan sampel.....	38
Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria.....	39
Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4. 4 Uji Normalitas	41
Tabel 4. 5 Uji Normalitas Setelah di Transformasi	42
Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi	45
Tabel 4. 8 Uji Heterokedastisitas.....	46
Tabel 4. 9 Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	48
Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
Tabel 4. 11 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)	50
Tabel 4. 12 Uji Signifikansi Individul (Uji t).....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4. 1 Uji Normalitas: Grafik Histogram.....	43
Gambar 4. 2 Uji Normalitas: Grafik Normal P-Plot.....	43
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variabel Dewan Komisaris Independen	62
Lampiran 2 Data Variabel Komite Audit	64
Lampiran 3 Data Variabel Intensitas Modal	66
Lampiran 4 Data Variabel Tax Avoidance	68
Lampiran 5 Uji Statistik Deskriptif	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sektor pajak merupakan sumber pendapatan utama. Pajak dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi negara dan kemudian digunakan untuk menjalankan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan fasilitas umum seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Pasal 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Menurut Soemitro dan Mardiasmo (2011) yang dikutip oleh Sugiyanto (2019) Pajak ialah kontribusi yang diberikan wajib pajak untuk kas negara menurut undang-undang (dapat dilaksanakan) dengan tidak menerima upah (imbalan) yang ditunjukkan setelahnya dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran negara.² Oleh karena itu, nantinya masyarakat akan merasakan manfaat pajak secara langsung maupun tidak langsung. Nzatta (2007) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi pungutan wajib warga negara atau bahkan orang asing kepada negara dan tunduk terhadap yurisdiksi pemerintah karena alasan tempat tinggal atau properti dan kontribusi ini untuk penggunaan umum.³

Dalam Islam, pajak (*dharibah*) merupakan salah satu bentuk muamalah dalam bidang ekonomi, namun dalam hal ini digunakan sebagai alat untuk

¹ Kemenkeu, “UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,” *Pravoslavie.ru* 2000 (2007).

² S Sugiyanto and J R Fitria, “The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor ...,” *Proceedings Universitas ...* (2019): 447–461.

³ Oyadonghan Kereotu James and Emmanuel Igbo Igbeng, “Corporate Governance , Shareholders Wealth Maximization and Tax Avoidance,” *Research Journal of Finance and Accounting* 5, no. 2 (2014): 127–130.

memenuhi keperluan negara guna menyediakan kebutuhan masyarakat. Dengan tidak adanya nash yang secara eksplisit membahas pajak dalam hukum islam, hal ini mempengaruhi status pemungutan pajak dan perbedaan pendapat diantara para fukaha.⁴ Dalam Islam, pajak diduga sebagai kewajiban yang diharuskan pada saat ini selain zakat dan diwajibkan oleh *ulil amri* (penguasa atau pemerintah).⁵ Dalam hal ini, kekosongan atau kekurangan harta benda tersebut digunakan kembali adalah wajib bagi kaum muslimin yang kaya raya dan digunakan untuk kepentingan mereka. Bukan untuk kepentingan umum, tetapi sebagai bentuk *ijtihad* bagi umat islam untuk mencegah kerusakan yang lebih besar jika hal ini terjadi. Pada masa Rasulullah pungutan tersebut meliputi zakat, *kharaj* (pajak tanah), *ushr* (bea impor), zakat fitrah, wakaf, infaq dan shodaqoh.

Penerimaan pajak di Indonesia belum optimal karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan pajak dengan baik. Mayoritas wajib pajak mengartikan pembayaran pajak merupakan suatu hal yang sangat ofensif, dan mengakibatkan wajib pajak menjalankan berbagai hal agar menghindari kewajibannya membayar pajak.⁶ Berikut adalah realisasi penerimaan pajak, baik yang berasal dari pajak, bukan pajak, dan hibah selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2020

Sumber Penerimaan	2018	%	2019	%	2020	%
Pajak	1928110.00	81,94%	1955136.20	82,5%	1628950.53	81,8%

⁴ Maman Surahman and Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–177. (p.167)

⁵ Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia," *Islamadina* 19, no. No.2 (2018): 75–91.

⁶ James and Igbeng, "Corporate Governance , Shareholders Wealth Maximization and Tax Avoidance."

Bukan Pajak	409320.20	17,40%	408994.30	17,26%	343814.21	17,26%
Hibah	15564.90	0,66%	5497.30	0,24%	18832.82	0,94%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Menurut data Kementerian Keuangan pada Tabel 1.1, penerimaan perpajakan Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, namun masih belum optimal karena penerimaan pajak yang belum mencapai target. Kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak masih di bawah target pemerintah yakni sebesar 85,65% atau sebesar Rp. 1.198,8 triliun. Namun penerimaan pajak yang diterima oleh negara pada tahun 2018 sebesar 81,94% atau Rp. 1.92,8 triliun, 82,5% atau Rp. 1.955,1 triliun pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebesar 81,8% atau Rp. 1.628,8 triliun.

Pajak badan adalah wajib pajak terbesar di Indonesia. Namun, wajib pajak badan sebagian besar melakukan perlawanan pajak karena salah satu tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan pengambilan investasi bagi pemegang saham dengan memaksimalkan laba. Hal ini juga disebabkan oleh perlawanan pajak secara agresif dari wajib pajak. Contoh agresivitas pajak banyak dijalankan oleh wajib pajak adalah *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* merupakan usaha penghindaran pajak yang melanggar hukum, dilakukan secara sengaja tidak melaporkan kewajiban atau menghilangkan sebagian transaksi untuk mendapatkan tarif pajak menjadi rendah.⁷ Di sisi lain, *tax avoidance* atau yang lebih dikenal dengan penghindaran pajak adalah upaya menghindari pembayaran pajak yang tidak keluar dari aturan hukum yang ada untuk menentukan jumlah pajak terutang dengan melihat peraturan yang berlaku (Hutagoal 2007).⁸ Hal ini terjadi karena wajib pajak memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam peraturan perundang-undang perpajakan. Menurut Pohan (2013) *Tax*

⁷ Hendrik Maula, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013 – 2017)" (2019): 1–114.

⁸ Calvin Singly and I Made Sukartha, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1 (2015): 47–62.

Avoidance merupakan suatu cara atau strategi yang dilakukan untuk menghindari pajak dengan legal dan aman yang dilakukan oleh wajib pajak karena tidak berlawanan dengan ketentuan undang-undang perpajakan.⁹

Di Indonesia masalah penghindaran pajak perlu diperhatikan dengan serius, menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diduga negara merugi sebesar Rp 68,7 triliun rupiah per tahun. Temuan yang dirilis oleh *Tax Justice Network* itu memperkirakan kerugian negara akibat penghindaran pajak mencapai Rp 68,7 triliun, termasuk wajib pajak badan melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 67,6 triliun dan sisanya sebesar Rp 1,1 triliun yang berasal dari wajib pajak orang pribadi. Suryo mengatakan pihaknya mengawasi transaksi istimewa untuk meminimalkan *tax avoidance*.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Salah satunya dari *corporate governance* perusahaan itu sendiri. Salah satu *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat efektif pajak yaitu dewan komisaris independent dan komite audit. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Noor Mita Dewi (2019) menyatakan proporsi komisaris independent berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, Lustina Rima Masurroch, dkk (2021) menyatakan hasil komisaris independent berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) menyatakan bahwa variabel proporsi kepemilikan independent berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan Friska Atika Saputri (2018) menyatakan dewan komisaris independent berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Welly Florentia Inriawati (2017) dan Desi Puspitasari Setianingsih (2021) yang menunjukkan hasil bahwa proporsi komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

⁹ Tiara Riza Falistiani Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015" (2017). (p. 23)

Selanjutnya komite audit sebagai variabel yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Welly Florentia Indriawati (2017) dan Desi Puspitasari Setianingsih (2021) yang menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sama halnya dengan Calvin Swingly, I Made Sukartha (2015) yang mengungkapkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifnya perusahaan dalam membayar pajak yaitu karakteristik sebuah perusahaan yang berkaitan dengan tingkat efektif pajak yaitu intensitas modal. Karena perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap, aset tersebut terus mengalami penyusutan setiap tahunnya yang memungkinkan perusahaan melakukan pengindaran pajak. Situasi tersebut akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Biaya penyusutan ini merupakan biaya penghasilan yang dapat dikurangkan dari perhitungan pajak perusahaan.¹⁰ Seperti pada penelitian Lustiana, dkk dan Ida Ayu Intan Dwiyanti Dan I Ketut Jati (2019) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh pada *tax avoidance*, sama halnya dengan Sugiyanto dan Juwita Ramadani Fitria (2019) menyatakan bahwa intensitas modal secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan Edy Supriyanto Dan Ummul Aqida (2020) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan Sugiyanto dan Juwita Ramadani Fitria (2019) menyatakan secara parsial intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Friska Atika Saputri (2018), Hendrik Maula (2019) menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Jakarta *Islamic Index* (JII) yang merupakan kategori pasar modal syariah yang memiliki 30 saham syariah yang tercatat di Bursa Efek

¹⁰ Darsono Muadz Rizki Muzakki, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 1 (2015): 1–8.

Indonesia. Jakarta *Islamic index* ialah satu satunya indeks saham yang terdapat di Indonesia yang menghitung *index* rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang dapat memenuhi syarat syariah. Perusahaan yang terdaftar di JII diharapkan menyajikan pengungkapan laporan pertanggung jawaban perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan dalam penelitian ini terdapat pada periode penelitian yang dilakukan yaitu tahun 2016-2021 dengan objek pada perusahaan yang terdaftar di JII.

Peneliti menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) sebagai pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) sesuai penelitian yang dilakukan Desi Puspitasari Setianingsih (2021), Proporsi Komisaris Independen sebagai pengukuran dewan komisaris independen sesuai penelitian yang dilakukan oleh Friska Atika Saputri (2018), dan jumlah komite audit dalam setahun (JKA) sebagai pengukuran komite audit sesuai penelitian yang dilakukan Welly Florentia Indriawati (2017). Dan rasio intensitas aset tetap sebagai pengukuran intensitas modal sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hendrik Maula (2019).

Tujuan penelitain ini yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat konsisten terkait dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian diatas, maka penelitian ini menggunakan judul **"PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDENT, KOMITE AUDIT DAN INTENSITAS MODAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2016-2021"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dewan komisaris Independent berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan JII tahun 2016-2021?
2. Bagaimana komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan JII tahun 2016-2021?
3. Bagaimana intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan JII tahun 2016-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh dewan komisaris independent terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2016-2021
2. Menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2016-2021
3. Menguji secara empiris pengaruh intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang tercatat di JII tahun 2016-2021

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi untuk pengembangan pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang perpajakan mengenai *tax avoidance* bagi wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan, serta memberikan pertimbangan wajib pajak tentang *tax avoidance*.
2. Mencegah terjadinya *tax avoidance* dengan cara memberikan masukan terhadap pemerintah mengenai kebijakan dalam sektor perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

3. Memberikan pedoman bagi perusahaan untuk pengelolaan kebijakan oleh manajemen dalam kegiatan *tax avoidance*, untuk mencegah perusahaan melakukan kegiatan legal maupun ilegal.
4. Untuk pertimbangan para investor saat melakukan investasi, agar dapat membandingkan perusahaan terhadap kepatuhan pajak perusahaan.
5. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan perbandingan yang berkaitan dengan *tax avoidance* di perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan mengenai landasan teori, pengetahuan yang digunakan dalam penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini dijelaskan terkait metode yang digunakan yang terdiri dari jenis dan sumber data penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data penelitian, variabel dan pengukuran penelitian, serta teknik analisis data penelitian.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjabarkan penjelasan mengenai proses dan hasil penelitian serta analisis data yang menguraikan tentang pengujian hipotesis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling, 1976 (dalam Yanuar Irawan, dkk.2017) Teori Agensi adalah teori yang mengutarakan bahwa antara manajemen dan pemilik memiliki kepentingan yang tidak sama. Model keagenan dirancang untuk sistem yang melibatkan kedua pihak, sehingga diperlukannya kontrak kerja antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Masalah ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen dalam memaksimalkan kegunaan (*utility*) pemilik (*principal*) dan hambatan (*constraint*) intensif yang didapatkan manajemen. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan adanya selisih kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*).¹¹

Dengan adanya perbedaan informasi antara manajemen (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) karena manajer lebih mengetahui informasi internal dan rencana masa depan perusahaan, berbeda dengan pemegang saham. Karena itu diperlukan perjanjian kerja yang efektif dan efisien untuk mencegah adanya informasi yang tersembunyi antara *agent* dengan *principal* atau antara pihak terkait.¹²

Berdasarkan teori agensi, dalam perusahaan manajer memiliki tujuan yang berbeda dengan perusahaan. Hubungan tersebut sama dengan hubungan pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah menginginkan penerimaan dari pajak dalam jumlah besar untuk

¹¹ Yanuar Irawan, Havid Sularso, and Yusriati Nur Farida, "Analisis Atas Penghindaran Pajak," *Soedirman Accounting Review* 02, no. 02 (2017): 114–127. (p. 118).

¹² Dudi Pratomo and Risa Aulia Rana, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2021): 91–103. (p. 94)

membantu negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintah. Sementara itu, perusahaan menginginkan seminimal mungkin dalam membayar pajak agar keuntungan yang dihasilkan optimal.¹³ Oleh karena itu perusahaan berupaya perencanaan pajak baik dengan cara *tax evasion* atau *tax avoidance* bertujuan supaya pajak yang perusahaan bayar dapat sekecil mungkin dan dapat membuat laba pajak yang tinggi. Hal tersebut membawa terjadinya perbedaan kepentingan atau masalah agensi antara perusahaan (wajib pajak) dengan pemerintah (pemungut pajak.)¹⁴

Dalam sistem perusahaan didasari oleh sebuah rancangan teori keagenan yang nantinya dapat berguna untuk memberi keyakinan bahwa pemegang saham yang telah investasi akan menerima keuntungannya.¹⁵ Teori agensi berfungsi sebagai solusi dalam menemukan jalan keluar dari dua jenis permasalahan yang muncul dalam hubungan kerja antara *principals* dan *agent*, yakni:

- a. *Agency Theory* timbul karena adanya perbedaan tujuan antara pemegang saham dengan para dewan direksi
- b. *Risk sharing problem* timbul karena adanya perbedaan cara antara pemilik dan direksi terhadap resiko yang terjadi. Namun, teori keagenan sendiri mengungkapkan terdapat cara untuk mencegah permasalahan kepentingan antar berbagai pihak dalam perusahaan. Dibutuhkannya prinsip-prinsip dasar mengenai pengelolaan

¹³ Yetty Murni, Eka Sudarmaji, and Eneng Sugihyanti, "The Role of Institutional Ownerships , Board of Independent Commissioner and Leverage : Corporate Tax Avoidance in Indonesia," *IOSR Journal of Business and Management Ver . 1* 18, no. 11 (2016): 2319–7668.

¹⁴ Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015."

¹⁵ Metiya Fatikhatur Riziqiyah and Bambang Agus Pramuka, "The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia," *Journal of Economy* 21, no. 1 (2021): 9–18.

perusahaan, dengan tujuan untuk menghindari konflik dan kerugian.¹⁶

Implikasi menjelaskan pengaruh variabel dewan komisaris independent, komite audit dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Perusahaan menginginkan adanya efisiensi pajak untuk mendapatkan keuntungan dengan cara penghindaran pajak. Dengan adanya perbedaan karakter antar pemegang saham dan manajemen, serta banyaknya aset perusahaan sebagai intensitas modal dan tata kelola perusahaan. Namun, hal tersebut dilakukan oleh manajemen (*agent*) tanpa melihat hal tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak.¹⁷

2.1.2 Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah usaha penghindaran pajak oleh wajib pajak karena legal atau tidak mematuhi peraturan perpajakan, dilakukan dengan menggunakan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang serta aturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan.¹⁸ Annisa dan Kurniasih (2012) dalam Tiara 2017 menjelaskan bahwa *tax avoidance* adalah suatu strategi pajak yang agresif yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak, sehingga kegiatan tersebut dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan.¹⁹ Menurut Desi dan Dharmapala 2006 dalam Silvia dan Puji 2014 *tax avoidance* adalah setiap usaha untuk memperbanyak keuntungan perusahaan yang

¹⁶ Desi Puspitasari. Setianingsih, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Listing Di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)" (2021): 6. (p.10)

¹⁷ Sugiyanto and Fitria, "The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor)"(p. 449).

¹⁸ Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

¹⁹ Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015."

diinginkan oleh pemegang saham, tetapi penerapannya dikerjakan oleh manajer.²⁰

Tax avoidance adalah kegiatan penghindaran pajak yang menggunakan skema transaksi dengan mengurangi beban pajak, dan menggunakan kelemahan peraturan perpajakan negara, sehingga bisa dinyatakan legal oleh ahli pajak.²¹ Upaya menjadikan beban pajak yang terutang dapat dilakukan dengan berbagai usaha mulai dari lingkup peraturan perpajakan hingga terjadinya pelanggaran peraturan perpajakan. Umumnya tujuan perencanaan pajak ialah untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, dengan melakukan merancang transaksi tanpa melanggar peraturan perpajakan. Pohan (2003) dalam Sugiyanto dan Juwita 2019 menjelaskan tujuan dari pengindaran pajak:

1. Meminimalkan beban pajak yang terutang
2. Meningkatkan laba setelah pajak
3. Mengurangi kejutan pajak (*tax surprise*) jika dilaksanakan pemeriksaan oleh fiskus.
4. Untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan efektif serta efisien.²²

Tax avoidance dilakukan dengan mengikuti aturan dan perundang-undangan yang legal. Dengan menggunakan kekurangan dari peraturan yang diterapkan, sehingga wajib pajak tidak dikatakan melanggar hukum. Adapula cara untuk melakukan kegiatan *tax avoidance*²³, sebagai berikut:

²⁰ Silvia Ratih Puspita and Puji Harto, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 1–13, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

²¹ Riziqiyah and Pramuka, "The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia."(p.11)

²²Sugiyanto and Fitria, "The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor)"(p. 451)

²³ Putri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015."

1. *Substantive tax planning*, yakni dengan mengalihkan subjek dan objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringan pajak (*tax haven country*) atau jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, yakni usaha *tax avoidance* dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi menggunakan pemilihan formal yang menggunakan beban pajak yang paling rendah.
3. *General anti avoidance rule*, kegiatan ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping* dan *controlled foreign corporation (specific anti avoidance rule)*, dan substansi bisnis yang tidak memiliki transaksi.

Tax avoidance merupakan kegiatan pengurangan pajak dengan memanfaatkan kelemahan aturan-aturan yang berlaku dilakukan oleh pihak manajemen untuk melindungi kepentingan pribadi dan bukan untuk meningkatkan kepentingan stakeholder perusahaan. Dalam islam kegiatan ini dilarang, Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Dalam QS An-Nisa: 59 Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk selalu mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-

hari melaksanakan ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan. Selalu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri dalam hal ini orang-orang yang membuat aturan tersebut.

Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dari kegiatan *tax avoidance*. Keuntungan yang didapat, antara lain:

1. Keuntungan bagi manajer perusahaan, manajer memperoleh imbalan dari pemegang saham perusahaan atas kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan
2. Dengan melakukan kegiatan *tax avoidance* manajer melakukan *rent extraction*. *Rent extraction* ialah tindakan manajer dengan tidak memaksimalkan kepentingan pemegang saham perusahaan, melainkan untuk kepentingan diri sendiri. Contohnya penyusunan laporan keuangan agresif atau melaksanakan transaksi dengan pihak istimewa.
3. Melakukan efisiensi pajak yang dibayarkan ke pemerintah dari perusahaan.

Dan kemungkinan kerugian yang terjadi jika perusahaan melakukan kegiatan *tax avoidance*, sebagai berikut:

1. Menurunnya reputasi perusahaan akibat pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh pegawai pajak
2. Berpeluang memperoleh sanksi atau pinalti dari pegawai pajak, dalam melakukan audit terdapat kecurangan
3. Anjloknya harga saham karena para pemegang saham mengetahui kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan manajer dalam *rent extraction*.

Tax Avoidance dapat dihitung menggunakan beberapa proksi antara lain, *Cash Effective Tax Rate* (CETR), *Effective Tax Rate* (ETR), *Book Tax Different* (BTD), dan *Book Tax Gap* (BTG). Proksi penghindaran

pajak yang pertama ialah *cash effective tax rate* (CETR). CETR merupakan jumlah kas yang harus dipenuhi oleh perusahaan mengenai pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. CETR merupakan pembagian antara kas yang digunakan oleh perusahaan untuk beban pajak atau pengeluaran dengan laba sebelum pajak. Tingkatan penghindaran pajak yang rendah diartikan penghindaran pajak yang besar, sebaliknya jika nilai CETR rendah maka tingkat penghindaran pajak besar. Pemerintah menetapkan tarif pajak badan sebesar 25%, maka apabila CETR mendekati 25% maka tingkat penghindaran yang dilakukan perusahaan tersebut rendah.²⁴ CETR diprosikan menggunakan rumus:

$$\text{Cash Effective Tax Rate (CETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Selanjutnya *effective tax rate* (ETR) merupakan rasio pajak yang dikeluarkan untuk keuntungan sebelum pajak periode tertentu, sehingga dengan *effective tax rates* (ETR) maka manajer akan mengetahui efektivitas perencanaan pajak perusahaan. Tujuan dari pengukuran ETR adalah untuk mengetahui beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Proksi *effective tax rate* (ETR) adalah sebagai berikut :

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Proksi selanjutnya dalam perhitungan penghindaran pajak yaitu proksi *Book Tax Different* (BTD) merupakan proksi yang menjelaskan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perusahaan akan tetap melaporkan laba akuntansi untuk kepentingan pemegang saham namun

²⁴ Ibid.

sekaligus menjalankan strategi penghindaran pajak jangka panjang dan jangka pendek. BTD menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Book Tax Different (BTD)} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Selanjutnya penghindaran pajak diukur menggunakan proksi *Book Tax Gap* (BTG). Pengukuran dengan transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai *logaritma natural* (Ln) dari data perhitungan BTG setiap perusahaan itu sendiri, sehingga BTG dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BTG} = \text{Ln} (\text{labanya sebelum pajak} - \text{penghasilan kena pajak})$$

Dalam penelitian ini *variable tax avoidance* diproksikan dengan menggunakan *cash effective tax rate* (CETR) diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan dengan perhitungan komponen rekonsialisasi fiskal, beda tetap maupun beda temporer. Penghindaran pajak digunakan sebagai skema transaksi untuk mengurangi beban pajak, dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan suatu negara, sehingga dapat dianggap legal oleh ahli pajak.

Dewan Komisaris Independent

Dewan komisaris independent merupakan dewan komisaris yang bukan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan dengan adanya dewan komisaris

independen diharapkan dapat menyeimbangkan manajemen perusahaan dan para stakeholder dalam perusahaan.²⁵

Anggota dewan komisaris independent dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan ketentuan berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/PJOK 04/2015. Dewan komisaris independent tidak boleh memiliki koneksi pribadi dengan para pemegang saham utama ataupun jajaran direksi yang lainnya.²⁶ Dengan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris independent terhadap kinerja direksi. Manajemen akan bertindak lebih transparansi dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat meminimalisir kegiatan *tax avoidance*.²⁷

Menurut kriteria yang ditetapkan oleh OJK perusahaan dengan dewan komisaris independent, memiliki tingkat pengawasan yang lebih baik. Oleh karena itu, dewan komisaris ataupun dewan direksi akan berupaya meningkatkan kinerjanya semaksimal mungkin dalam mengontrol segala kegiatan manajemen agar sejalan dengan peraturan yang berlaku.²⁸

Komite Audit

Keberadaan komite audit berperan untuk membantu dewan komisaris dalam mencapai tanggung jawabnya mengenai akuntansi, audit, pengendalian internal, dan pemantuan prosedur laporan keuangan. Karena komite audit juga berperan dalam pemilihan auditor eksternal yang tepat untuk mengaudit laporan keuangan, komite audit bertanggung jawab memantau proses pelaporan keuangan secara

²⁵ Bambang Agus. Prasetyo, Irwan. Pramuka, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Aoidance," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018): 1–15.

²⁶ Pratomo and Risa Aulia Rana, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak."

²⁷ P. R. Diantari and IGK A. Ulupui, "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi* 16, no. 1 (2016): 702–732.

²⁸ Welly Florentia Indriawati, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating," *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi* (2017): 1–81.

internal dan eksternal, sehingga komite audit terlibat dalam ruang lingkup audit dan proses perencanaan audit.²⁹ Selain itu, fungsi dari komite audit adalah membantu manajer meningkatkan kinerjanya guna menaikkan laba perusahaan, hal tersebut yang akan mencegah manajemen melakukan praktik penghindaran pajak. Maka dari itu, komite audit dengan wewenang yang dimiliki dapat mencegah setiap perselisihan atau masalah terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Sesuai dengan kep. 29/PM /2004 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, komite audit merupakan komite tambahan yang bertujuan untuk melakukan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen.³⁰

Tujuan dari komite audit yakni membantu dewan komisaris untuk :

- a. Memaksimalkan kualitas laporan keuangan perusahaan
- b. Mewujudkan lingkungan perusahaan yang disiplin dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi audit baik eksternal maupun internal.
- d. Mengenali situasi yang memerlukan perhatian dewan komisaris
- e. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan

Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan konflik keagenan yang timbul akibat keinginan manajemen dalam melakukan kecurangan dapat diminimalkan. Komite audit diproksikan

²⁹ Hidayat Al Lawati and Khaled Hussainey, "Risk and Financial Management: Do Overlapped Audit Committee Directors Affect Tax Avoidance?," *Journal of Risk and Financial Management*, no. 14 (2021): 487, <https://doi.org/10.3390/jrfm14100487>.

³⁰ Anis Nur Fitasari, "Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance (Studi Penelitian Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018)" (2020): 1–130.

dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan, dan penelitian ini juga di lakukan oleh Welly Florentia Indriawati (2017)³¹

Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan cara pengambilan keputusan keuangan. Keputusan ditetapkan oleh manajemen perusahaan guna meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal menunjukkan banyaknya modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan profitabilitas. Sumber dana dan kenaikan modal akan didapatkan dari penurunan (dijual) atau peningkatan (pembelian) aset tetap.³²

Intensitas modal berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap. Semakin tinggi intensitas modal yang dimiliki oleh perusahaan, maka beban depresiasi menjadi semakin meningkat. Sehingga menurunnya laba perusahaan mengakibatkan pajak terutang perusahaan juga semakin turun. Jika laba yang dimiliki perusahaan semakin menurun, maka perusahaan memiliki ETR rendah hal tersebut dapat diindikasikan tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan tersebut semakin tinggi. Sehingga beberapa perusahaan memiliki aset tetap yang besar melakukan perencanaan pajak karena menyebabkan ETR-nya tergolong rendah.³³

Dalam penelitian ini intensitas modal diproksikan dengan rasio intensitas aset tetap. Rasio intensitas aset tetap merupakan perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan.

³¹ Indriawati, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating."

³² Maula, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013 – 2017)."p. 24.

³³ Ida Ayu Intan Dwiyaniti and I Ketut Jati, "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak," *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019): 2293.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis yang diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lustina Rima Masrulloch, Siti Nurlaela, Rosa Nikmatul Fajri (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Leverage tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 5. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
2	Noor Mita Dewi (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Dewan komisaris independent berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

		<i>Avoidance</i>) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016	
3	Desi Puspitasari Setianingsih (2021)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus pada Perusahaan yang <i>Listing</i> di Jakarta <i>Islamic Index</i> Tahun 2015-2020)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 5. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
4	Friska Atika Saputri (2018)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Intensitas Modal dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Pada Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Dewan komisaris independent berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>

		Jasa Subsektor Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	
5	Dudi Pratomo, Risa Aulia Rana (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
6	Arry Eksandy (2017)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) (Studi Empiris pada Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 4. Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 5. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 6. Kualitas audit berpengaruh

			signifikan terhadap penghindaran pajak
7	Calvin Swingly, I Made Sukartha (2015)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakter eksekutif berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> 2. Komite audit tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> 3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i> 4. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> 5. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i>
8	Welly Florentia Indriawati (2017)	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 5. Profitabilitas dapat memoderasi secara signifikan

			<p>pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak</p> <p>6. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.</p>
9	Putu Rista Diantari, IGK Agung Ulupui (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
10	Eka Murni Lusiana Wati, Susi Astuti (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Good Corporate Governance</i> dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Return on assets berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, 3. Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

		Pertambahan Sektor Batu Bara di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018	4. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
--	--	--	--

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Peran penting dewan komisaris independen pada perusahaan sebagai pengawas dan berperan juga memastikan perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan komisaris independen adalah dewan independent dan tidak ada hubungannya dengan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham pengendali. Karena semakin banyak dewan komisaris independent dalam perusahaan, presentase independensi perusahaan semakin meningkat sehingga semakin rendah pula kegiatan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut.³⁴

Teori agensi menjelaskan manajemen merupakan *agent* yang memiliki banyak informasi tentang perusahaan, sedangkan pemegang saham adalah *principal* yang memiliki informasi terbatas. Dalam hal ini dewan komisaris independent mempunyai tugas untuk mengawasi kegiatan agent atau manajemen perusahaan. Sehingga semakin banyak dewan komisaris independent maka kegiatan penghindaran pajak dapat dihindari.³⁵

Metiya Fatikhatur Rizqiyah dan Bambang Agus Pramuka (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independent berpengaruh

³⁴ Pratomo and Risa Aulia Rana, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak."

³⁵ Maula, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013 – 2017)."

negative terhadap penghindaran pajak, Desi Puspitasari Setianingsih (2021) juga mengungkapkan bahwa dewan komisaris independent berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan pengaruh dewan komisaris independent terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis kedua yang akan diuji pada penelitian ini yaitu:

H1: Dewan Komisaris Independent berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit bertugas menangani pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Selain itu, Komite audit juga mendukung dewan komisaris dan dewan pengawas dalam melakukan *controlling* atau pengawasan tentang penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit, manajemen resiko serta penerapan dari *corporate governance* yang ada diperusahaan.³⁶

Semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan, kemungkinan komite audit melakukan pengawasan semakin memaksimalkan dengan adanya komite audit dapat mengurangi konflik keagenan yang timbul oleh pihak manajemen dalam melaksanakan kegiatan penghindaran pajak dapat diminimalisir. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih transparan dan tanggung jawab dalam menyampaikan laporan keuangan karena komite audit mengawasi oprasional perusahaan.

³⁶ Setianingsih, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Listing Di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)."

Dalam hal ini, anggota komite audit harus memiliki pengetahuan dibidang akuntansi keuangan dan aturan perpajakan untuk mengurangi resiko deteksi dan dapat menghasilkan saran yang bermanfaat bagi manajemen perusahaan.³⁷

Pada penelitian Metiya Fatikhatur Rizqiyah dan Bambang Agus Pramuka (2021) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sama halnya dengan penelitian Desi Puspitasari Setianingsih (2021) menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan Dudi Pratomo dan Risa Aulia Rana (2021) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan penjelasan pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis ketiga yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.3.3 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Semakin tinggi intensitas modal, maka beban depresiasi dapat dikurangi dari penghasilan atau *deductible expense*. Beban depresiasi yang tergolong *deductible expense* kemungkinan besar akan mengakibatkan laba kena pajak perusahaan menjadi menurun dan jumlah pajak yang harus dibayar akan berkurang.³⁸

Semakin besar perusahaan memiliki intensitas modal semakin besar pula beban depresiasi yang didapatkan perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Teori agensi mengindikasikan terdapat kesepahaman antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer perusahaan) yang bertujuan untuk meningkatkan

³⁷ Ibid.

³⁸ Sugiyanto and Fitria, "The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor"

profitabilitas dari segi aset tetap yang akan didapatkan perusahaan. Pemegang saham menghendaki manajer agar menghasilkan dan mengelola laba atas aset tetap dengan baik. Artinya biaya yang terkait untuk membayar pajak tidak terlalu besar.³⁹

Pada penelitian Hendrik Maula (2019) menjelaskan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, begitu juga pada penelitian Sugiyanto dan Juwita Ramadani Fitria (2019) yang menghasilkan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sesuai penjelasan diatas mengenai pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

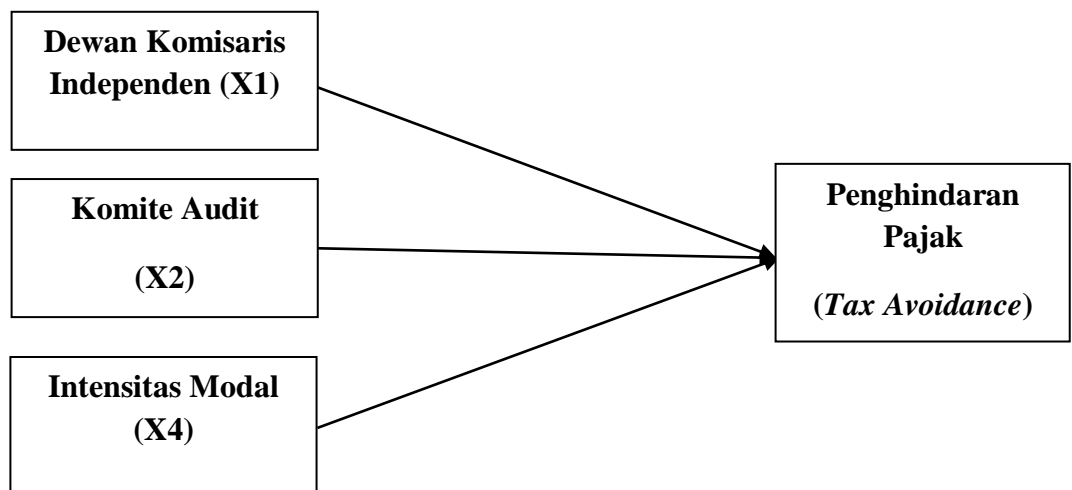
H3: Intensitas Modal berpengaruh positif Terhadap *Tax Avoidance*

³⁹ Maula, “Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013 – 2017).”

2.4 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga variabel independen yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel tersebut terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit dan intensitas modal. Informasi dari variabel-variabel tersebut diperoleh melalui laporan tahunan perusahaan yang menerbitkan saham di Jakarta *Islamic index* tahun 2016-2021. Oleh karena itu kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data berupa analisis regresi linier berganda.⁴⁰ Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dari perusahaan yang menerbitkan saham di Jakarta *Islamic Index* dan secara konsisten.

Data yang digunakan diperoleh melalui website BEI yaitu www.idx.co.id atau dari website masing-masing perusahaan, dan diambil dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴¹ Populasi yang digunakan yaitu perusahaan yang masuk dalam kategori saham syariah di Jakarta *Islamic Index*. Pemilihan Jakarta *Islamic Index* sebagai objek penelitian karena menerbitkan saham perusahaan yang termasuk kedalam kriteria saham syariah dan peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan yang menerbitkan saham di Jakarta *Islamic Index* terindikasi melakukan kegiatan penghindaran pajak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik dari populasi tersebut.⁴² Untuk menentukan sampel yang akan diteliti peneliti menggunakan metode *purposive sampling* bertujuan untuk mendapatkan sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018). p.80.

⁴¹ Ibid. p.148.

⁴² Ibid. p.149.

1. Perusahaan yang tetap terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) dengan periode 2016-2021
2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan (*annual report*) tahun 2016-2021
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam menerbitkan laporan keuangan
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dalam periode 2016-2021
5. Perusahaan yang memiliki ETR >1

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan tertulis tentang berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa ke masa.⁴³ Metode dokumentasi yang digunakan adalah mengunduh data dari *annual report* perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic index* pada tahun 2016-2021 melalui website www.idx.co.id atau website pada masing-masing perusahaan. Studi literatur yang digunakan pada penelitian ini berupa buku, jurnal penelitian dan skripsi penelitian terdahulu yang berguna untuk memperoleh teori-teori yang berkaitan.

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran

3.4.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen.⁴⁴ Peneliti menggunakan pengindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen.

3.4.1.1 Tax Avoidance (Y)

Tax Avoidance merupakan strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam peraturan perpajakan. Pengindaran pajak atau *tax avoidance* menggunakan

⁴³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010),p.26

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. p.97

perencanaan pajak secara legal meminimalkan pajak penghasilan yang dibayarkan. *Tax avoidance* diproyeksikan dengan rasio *cash effective tax rates* (CETR) sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Metiya Fatikhatur Rizqiyah dan Bambang Agus Pramuka (2021) rasio CETR diukur dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

CETR menjelaskan rasio atau presentase antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan kepada negara dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak.

3.4.2 Variabel Independen

Variabel independen atau sering disebut sebagai variabel bebas. Variable independen yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau yang mempengaruhi variabel dependen (terikat).⁴⁵ Variable independen pada penelitian ini yaitu dewan komisaris independen dan komite audit, serta intensitas modal.

3.4.2.1 Dewan Komisaris Independen

Keberadaan variabel komisaris independen yang meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan efektifitas aktivitas monitoring yang diukur dengan menggunakan dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Variabel dewan komisaris independen diprosikan dalam presentase komisaris independen dalam perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen diukur menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah komisaris perusahaan}} \times 100\%$$

⁴⁵ Ibid. p.96.

3.4.2.2 Komite audit

Pengukuran komite audit ialah jumlah seluruh anggota komite audit yang terdapat dalam perusahaan. PBI Nomor: 11/33/PBI/2009 menetapkan jumlah anggota komite audit minimal tiga orang anggota, terdiri dari satu komisaris independent perusahaan yang merangkap sebagai ketua komite keahlian di dalam bidang keuangan.

$$JKA = \Sigma \text{ Komite Audit dalam setahun}$$

3.4.2.3 Intensitas Modal

Intensitas modal diproksikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap menganalisis rasio atau proporsi aset tetap perusahaan dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan.

$$\text{Rasio intensitas aset tetap} = \frac{\text{total aset tetap}}{\text{total aset}}$$

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan alat statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan atau mengilustrasikan objek yang diteliti menggunakan data sampel sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis atau membuat kesimpulan yang berlaku umum.⁴⁶ Statistik deskriptif memberikan informasi mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum range*, kurtosis, *skewness* (kemencengan distribusi).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah suatu pengujian hipotesis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu model regresi layak atau tidak untuk dianalisis lebih lanjut. Penyimpangan asumsi

⁴⁶ Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014). p.29.

klasik terdapat empat : uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.⁴⁷

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual dalam suatu model regresi terdistribusi normal atau tidak. Untuk menentukan apakah variabel residual terdistribusi normal atau tidak menggunakan analisis grafik, sedangkan normalitas suatu variabel umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik. Variable tersebut dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.⁴⁸

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya model regresi dalam hubungan linear antar variabel independent. Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah didalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Nilai *tolerance* apabila uji multikolinieritas dapat terjadi yaitu > 0.10 dan nilai VIF < 10 .⁴⁹

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan antara periode saat ini dengan penyimpangan periode sebelumnya pada model regresi linier. Penelitian ini menggunakan nilai Durbin-Watson (DW test) dengan menggunakan persamaan $dU < d < 4-dU$. Apabila terdapat korelasi maka terjadi autokorelasi,

⁴⁷ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011). p.19

⁴⁸ Ibid. p.105

⁴⁹ Ibid. p.105-6.

karena model regresi dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi.⁵⁰

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah pada regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.⁵¹ Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas ialah dengan melakukan uji *park*, uji *glesjer*, uji *white* dan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID dengan tingkat probabilitas signifikansi diatas 5%.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

3.5.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menganalisis adanya pengaruh dewan komisaris independen, komite audit dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic index* tahun 2016-2021 dengan $\alpha = 5\%$. Dengan model persamaan regresi linear berganda yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y = Tax Avoidance$ (Penghindaran Pajak)

$\alpha =$ Nilai Y, apabila $X_1 = X_2 = 0$

$\beta_1, \beta_2, \beta_3 =$ Koefisien regresi linier berganda

$X_1 =$ Dewan Komisaris Independen

$X_2 =$ Komite Audit

⁵⁰ Ibid. p.110-111.

⁵¹ Ibid. p.139.

$X_3 = \text{Intensitas Modal}$

$\varepsilon = \text{Kesalahan Pengganggu (disturbance term)}$

3.5.3.2 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan menentukan seberapa banyak variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Adapun koefisien determinasi berkisar antara 0,1. Semakin kecil nilai R^2 , maka kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen sangat terbatas, begitupun sebaiknya jika nilai R^2 yang mendekati 1, menunjukkan variabel independen dapat menjelaskan seluruh informasi yang diperlukan untuk variabel dependen.⁵²

3.5.3.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model digunakan untuk memperlihatkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama (simultan).⁵³ Terdapat tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05 (5%). Jika nilai signifikansi yang dihasilkan kurang dari 0,05, dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05, maka variabel independent secara simultan tidak terpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.4 Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t berguna untuk menentukan perbedaan pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dan nilai t pada output analisis regresi menggunakan bantuan SPSS. Nilai signifikansi yang digunakan sebesar

⁵² Ibid. p.97.

⁵³ Ibid. p.98.

0,05 ($\alpha=5\%$). Adapun pengambilan keputusan pada uji t yaitu apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak berarti terdapat perbedaan signifikansi antara model regresi dengan nilai observasi, sehingga variabel independent pada penelitian ini mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, hipotesisnya diterima hal ini berarti model mampu memprediksi nilai observasinya sehingga variabel independent tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dewan komisaris independent, komite audit dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak) pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index* tahun 2016-2021. Pengujian dilakukan dengan menguji variable independen yang terdiri dari dewan komisaris independen dengan proporsi dewan komisaris independent, komite audit dengan jumlah komite audit dan intensitas modal diproksikan dengan rasio intensitas aset tetap terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang diproksikan dengan *Cash effective tax rate* (CETR).

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic index* tahun 2016-2021. Data penelitian diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Populasi perusahaan yang menerbitkan saham di JII selama enam tahun sebanyak 49 perusahaan. Dari populasi yang menjadi sampel, selanjutnya ditentukan sampel penelitian dengan metode *purposive sampling*.

Sampel yang didapatkan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Kriteria pemilihan sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan yang tetap terdaftar di Jakarta <i>Islamic index</i> (JII) tahun 2016-2021	11
2	Perusahaan yang tidak merilis laporan keuangan (<i>annual report</i>) tahun 2016-2021	0
3	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam merilis laporan keuangan (<i>annual report</i>)	(2)

4	Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2016-2021	0
5	Perusahaan yang mempunyai ETR >1	(1)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		8
Jumlah sampel penelitian 8 x 6 tahun		48

Sumber: data sekunder yang sudah diolah

Berdasarkan pengambilan sampel diperoleh data perusahaan yang terdaftar di Jakarta *Islamic index* tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
2	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
3	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
4	KLBF	Kalbe Farma
5	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk.
6	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Perseroan) Tbk.
7	UNTR	United Tractors Tbk.
8	UNVR	Uniliver Indonesia Tbk.

Sumber: data diolah

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjabarkan suatu data yang dilihat dari nilai standar deviasi, maksimum, minimum, mean (rata-rata) dari masing-masing variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti adalah *tax avoidance*, dewan komisaris independent, komite audit dan intensitas modal. Hasil uji statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Uji Statistik Deskriptif

		Descriptive Statistics				
		N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan	Komisaris	48	0.17	0.83	0.4316	0.18527
Independen						
Komite Audit		48	3	7	3.44	0.987
Intensitas Modal		48	0.120	0.710	0.36139	0.157597
Tax Avoidance		48	0.033	0.908	0.31836	0.173599
Valid N (listwise)		48				

Sumber: data sekunder yang diolah spss 24, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa jumlah sampel atau N yang valid akan diteliti adalah 48 data, yang berasal dari 8 sampel perusahaan yang terdaftar pada Jakarta *Islamic Index* (JII) Tahun 2016-2021. Hasil analisis terhadap variabel dewan komisaris independen menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,4316 dengan standar deviasi sebesar 0,18527 dengan nilai *minimum* 0,17 dan nilai *maximum* 0,83.

Variabel komite audit, pada uji statistik deskriptif diperoleh rata-rata sebesar 3,44 dengan standar deviasi sebesar 0,987 nilai *minimum* pada variabel dewan komisaris independent sebesar 3 dan nilai *maximum* sebesar 7.

Uji statistik deskriptif pada variabel intensitas modal diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,36139 dengan standar deviasi 0,157597, nilai *minimum* sebesar 0,120 dan nilai *maximum* sebesar 0,710.

Variabel *tax avoidance* pada uji statistik deskriptif diperoleh rata rata sebesar 0,31836 standar deviasi 0.173599 dengan nilai *minimum* sebesar 0,033 dan nilai *maximum* sebesar 0,908.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji kelayakan terhadap model regresi yang digunakan pada penelitian. Tujuan dari uji asumsi klasik memastikan bahwa tidak terdapat autokorelasi, multikolinearitas,

heteroskedastisitas dan untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal.

4.3.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independent dapat terdistribusi normal atau tidak . Uji statistik dapat diketahui pada uji *One - Sample Kolmogrov Smirnov* (K-S) dengan ketentuan data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai profitabilitas signifikansi $> 0,05$. Grafik histogram dan grafik normal P-Plot untuk analisis grafik. Berikut hasil uji normalitas menggunakan *One - Sample Kolmogrov Smirnov* (K-S) :

Tabel 4. 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.16841382
Most Extreme Differences	Absolute	0.173
	Positive	0.173
	Negative	-0.101
Test Statistic		0.173
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data sekunder diolah SPSS 24,2022

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* bernilai 0,001 yang artinya kurang dari 0,05 atau data tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, transformasi data dapat dilakukan dengan bentuk *Logaritma Natural* (LN) untuk memenuhi kriteria uji normalitas.

Berikut hasil uji normalitas setelah data ditransformasi menggunakan *Logaritma Natural* :

Tabel 4. 5 Uji Normalitas Setelah di Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.52044062
Most Extreme Differences	Absolute	0.120
	Positive	0.120
	Negative	-0.119
Test Statistic		0.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.079 ^c

a. Test distribution is Normal.

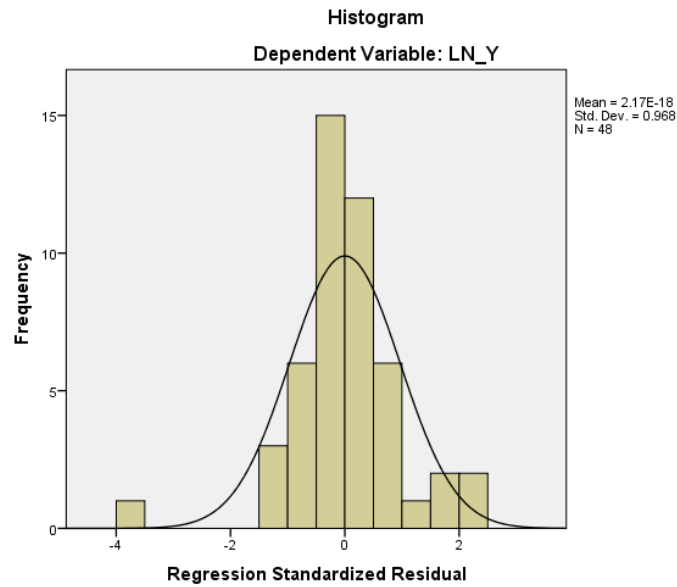
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data sekunder diolah SPSS 24,2022

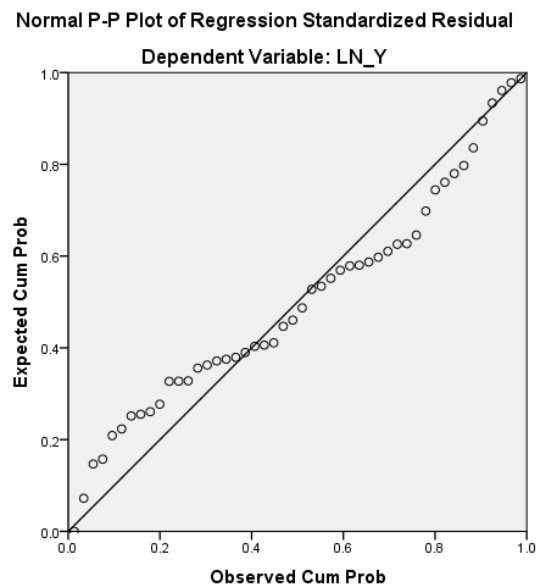
Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-smirnov* setelah data di transformasikan nilai *asyp sig. (2-tailed)* sebesar 0,079. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai *asyp. sig. > 0,05* atau 5% sehingga menunjukkan bahwa data residual dalam regresi terdistribusi secara normal ($0,079 > 0,05$), artinya model regresi pada penelitian ini memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4. 1 Uji Normalitas: Grafik Histogram



Sumber: Output Olahan IBM Spss 24,2022

Gambar 4. 2 Uji Normalitas: Grafik Normal P-Plot



Sumber: Output Olahan IBM Spss 24,2022

Berdasarkan uji normalitas dengan analisis grafik histogram pada Gambar 4.1 menghasilkan pola distribusi ditengah-tengah atau berbentuk lonceng (*bell shaped*) yang artinya data

terdistribusi secara normal. Sedangkan pada Gambar 4.2 grafik normal P-Plot titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, namun penyebaran mendekati garis diagonal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi dikatakan baik apabila tidak terdapat korelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk melihat multikoleniaritas dapat dilihat melalui nilai *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance value* yang digunakan sebesar $\geq 0,10$ dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) sebesar ≤ 10 .

Tabel 4. 6 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN_X1	0.760	1.315
	LN_X2	0.647	1.546
	LN_X3	0.519	1.928

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data sekunder diolah SPSS 24, 2022.

Berdasarkan hasil dari uji multikolineritas pada Tabel 4.6 disimpulkan bahwa tidak ada variabel independent dalam penelitian ini yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 atau semua nilai *tolerance* dalam penelitian ini diatas 0,10. Jika dilihat

dari nilai VIF, maka tidak ada variable independent yang memiliki nilai diatas 10, artinya semua nilai VIF pada analisis ini kurang dari 10. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak ada multikolinieritas sehingga data didalam penelitian ini dapat digunakan.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear terdapat perbedaan periode saat ini dengan penyimpangan periode sebelumnya. Nilai Durbin-Watson (DW test) digunakan dengan persamaan $dU < d < 4-dU$. Jika terdapat korelasi, maka ditemukan autokorelasi karena model regresi dikatakan baik apabila terbebas dari autokorelasi. Uji Autokorelasi

Tabel 4. 7 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.137 ^a	0.019	-0.048	0.53789	1.808

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data skunder diolah SPSS 24, 2022.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.7 dihasilkan nilai DW sebesar 1,808 dengan nilai signifikansi 5% banyak sampel (n) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 48, dengan jumlah variabel independent sebanyak 3 variable (K= 3).

Berdasarkan jumlah variabel independen yang digunakan pada penelitian ini nilai dL dan dU yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan tarif signifikansi 5% maka menghasilkan batas bawah (dL) sebesar 1,4064 dengan nilai batas atas (dU) sebesar 1,6708. Hasil dari 4-dU sebesar 2,3292 dan 4-dL sebesar 2,5936. Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui nilai Durbin-Watson

sebesar 1,808, dapat disimpulkan bahwa hasil olah data tersebut sama dengan persamaan $dU < d < 4-dU$ yaitu $1,6708 < 1,808 < 2,3292$. Yang artinya secara positif maupun negatif tidak terjadi autokorelasi. Sehingga dalam penelitian ini bisa dikatakan tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Untuk mengetahui heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* dengan meregres nilai *absolut residual* terhadap variabel independen. Berikut adalah hasil grafik dari uji heteroskedastisitas:

Tabel 4. 8 Uji Hetersokedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-0.798	0.679		-1.175	0.246
	LN_X1	-0.126	0.203	-0.106	-0.618	0.539
	LN_X2	-0.335	0.426	-0.146	-0.788	0.435
	LN_X3	0.167	0.251	0.138	0.666	0.509

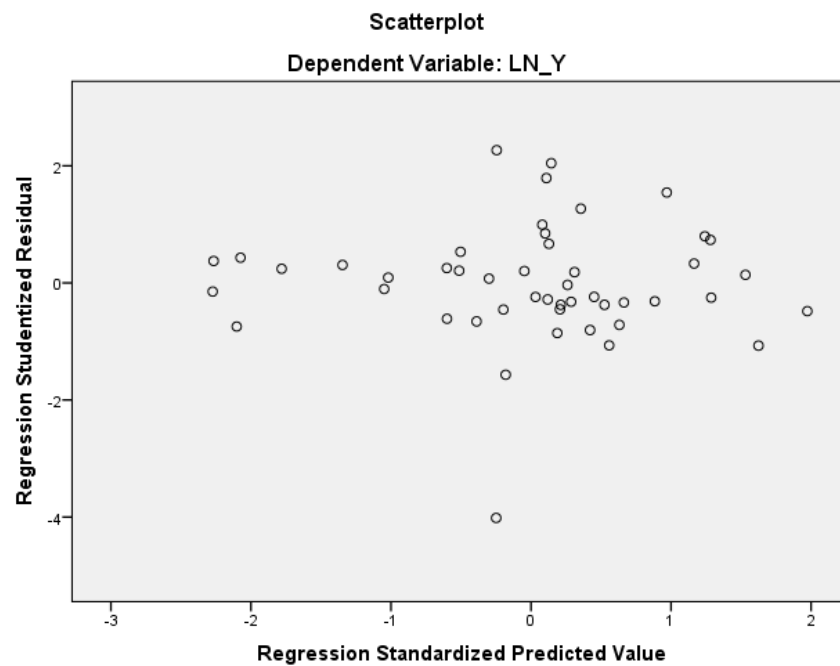
a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data skunder diolah SPSS 24, 2022.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *glejser* menunjukkan hasil dengan nilai signifikansi variabel dewan komisaris independen 0,539, variabel komite audit sebesar 0,435, dan variabel intensitas modal sebesar 0,509. Berdasarkan hasil

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% ($sig. < 0,05$). Selain dilihat melalui uji glejser, uji heterokedastisitas pada penelitian ini dengan melihat grafik *scatterplot*:

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan Gambar 4.3 titik-titik plot tidak membentuk pola seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit. Titik-titik pola menyebar hampir merata diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas.

4.4 Pengujian Hipotesis

4.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui dan menganalisis besaran pengaruh variabel independent terhadap variable dependen dan untuk menentukan arah hubungan antara variable independen dan dependen. Hasil persamaan regresi yang diolah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized		Standardize	t	Sig.
		Coefficients		d		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.798	0.679		-1.175	0.246
	LN_X1	-0.126	0.203	-0.106	-0.618	0.539
	LN_X2	-0.335	0.426	-0.146	-0.788	0.435
	LN_X3	0.167	0.251	0.138	0.666	0.509

Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data sekunder diolah SPSS 24, 2022.

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda yang terdapat pada Tabel 4.9 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,798 - 0,126 X1 - 0,335 X2 + 0,167 X3 + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar - 0,798, hal ini berarti apabila variabel dewan komisaris independen (X1), komite audit (X2), intensitas modal (X3) adalah 0, maka nilai dari *tax avoidance* sebesar - 0,798.
2. Nilai koefisien regresi dewan komisaris independen dengan proksi proporsi komisaris independen sebesar - 0,126. Hal ini berarti jika dewan komisaris independen mengalami peningkatan sebesar 1%, hal ini berarti bersamaan dengan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,126 atau sebesar 12,6%, dengan asumsi bahwa variabel komite audit dan intensitas modal memiliki nilai nol atau konstan.
3. Nilai koefisien regresi komite audit dengan proksi jumlah komite audit sebesar -0,335. Hal ini berarti terdapat peningkatan kegiatan *tax avoidance* sebesar 0,335 atau 33,5% dengan asumsi dewan komisaris independen dan intensitas modal memiliki nilai nol atau konstan.

4. Nilai koefisien regresi variabel intensitas modal sebesar 0,167. Apabila terjadi peningkatan pada variable intensitas modal sebesar 1%, bersamaan dengan meningkatnya kegiatan *tax avoidance* sebesar 0,167 atau 16,7% dengan asumsi dewan komisaris independen dan komite audit memiliki nilai nol atau konstan.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan variable independen dalam menjelaskan variasi variable dependen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain diluar model. Berikut ini hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4. 10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.137 ^a	0.019	-0.048	0.53789	1.808

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

b. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data sekunder diolah SPSS 24, 2022.

Berdasarkan Tabel 4.10 diperoleh nilai R^2 sebesar 0,019, menunjukkan bahwa variable independen yang terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit dan intensitas modal dapat menjelaskan *tax avoidance* sebesar 1,9% dan 98,1% dijelaskan oleh variable luar model regresi, seperti kepemilikan intitusional, profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan perusahaan, kualitas audit, dll.

4.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Signifikansi Simultan atau Uji F merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui apakah variable dependen

dipengaruhi oleh variabel independen secara simultan atau bersama-sama. Jika tingkat probabilitasnya $< 0,05$, maka semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 11 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.245	3	0.082	0.282	0.838 ^b
	Residual	12.730	44	0.289		
	Total	12.975	47			

a. Dependent Variable: LN_Y

b. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

Sumber: data sekunder diolah SPSS 24, 2022.

Berdasarkan tabel diatas, Uji Signifikansi Simultan nilai-F sebesar 0,282 dengan nilai *sig* sebesar 0,838 yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil ini menjelaskan bahwa variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit dan intensitas modal secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

4.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Kriteria uji t adalah dengan melihat *probability value (sig)-t*, jika $\text{sig-t} < 0,05$ atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima dan didukung.

Tabel 4. 12 Uji Signifikansi Individul (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0.798	0.679		-1.175	0.246		
	LN_X1	-0.126	0.203	-0.106	-0.618	0.539	0.760	1.315
	LN_X2	-0.335	0.426	-0.146	-0.788	0.435	0.647	1.546
	LN_X3	0.167	0.251	0.138	0.666	0.509	0.519	1.928

a. Dependent Variable: LN_Y

Sumber: data sekunder diolah SPSS 24, 2022.

Berdasarkan hasil uji signifikansi individual (uji t) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independent berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil uji parsial antara variable dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, menghasilkan t hitung sebesar -0,618 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 2,01537 ($-0,618 < 2,01537$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,539 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,539 > 0,05$) sehingga variabel dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance*, sehingga hipotesis 1 ditolak

2. Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avildance*

Berdasarkan uji parsial antara variable komite audit terhadap *tax avoidance*, diperoleh t hitung sebesar -0,788 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 2,01537 ($-0,788 < 2,01537$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,435 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,435 > 0,05$) sehingga variable komite audit tidak berpengaruh

terhadap variable dependen *tax avoidance*, sehingga hipotesis 2 ditolak.

3. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uji parsial antara variable intensitas modal terhadap *tax avoidance*, diperoleh t hitung sebesar 0,666 yang lebih kecil dari t tabel yaitu 2,01537 ($0,666 < 2,01537$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,539 atau lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,539 > 0,05$) sehingga variable komite audit tidak berpengaruh terhadap variable dependen *tax avoidance*, sehingga hipotesis 3 ditolak.

4.5 Pembahasan Hipotesis

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) tahun 2016-2021. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada variable independen terhadap variable dependen diperoleh hasil yang berbeda dengan hipotesis dalam penelitian ini. Berikut pembahasan mengenai hipotesis yang telah diuji:

4.5.1 Pengaruh Dewan Komisaris Independent Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan olah data yang dilakukan, dapat dilihat bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis pertama ditolak yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini serupa dengan penelitian Desi Puspitasari Setianingsih (2021), Welly Florentia Indriawati (2017), dan Sunarsih, dkk. (2019) yang menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016), Lustiana Rima Masrurroch (2021), dan Friska Atika Saputri (2018) yang

menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Fungsi dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah sebagai pengawas dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen sehingga dapat diperkirakan bahwa dewan komisaris independent tidak dapat mempengaruhi penurunan kegiatan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Dewan komisaris independent seharusnya menjadi penggerak terwujudnya *good corporate governance*, sehingga perlu ditingkatkan kembali kinerjanya dalam mengawasi operasional perusahaan.

Dalam teori agensi menjelaskan dewan komisaris independen sebagai pengawas dan penyeimbang dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan namun dewan komisaris independen tidak memberikan dampak terhadap penurunan kegiatan penghindaran pajak suatu perusahaan. Keberadaan komisaris independent secara tidak langsung tidak memiliki keterkaitan langsung dalam kegiatan penghindaran pajak, karena adanya keterbatasan pengawasan dan banyak pihak yang mendominasi untuk mengendalikan komisaris independen. Karena ini tidak sesuai dengan teori agensi dan fungsi dari dewan komisaris independen.⁵⁴

4.5.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan olah data yang dilakukan, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis kedua ditolak yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Noor Mita Dewi (2019), Dudi Pratomo dan Risa

⁵⁴ Setianingsih, "Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Listing Di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)."

Aulia Rana (2021), Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Anis Nur Fitasari (2020), Desi Puspitasari Setianingsih (2021), Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit berperan mengawasi dan membantu dewan komisaris dalam meminimalisir terjadinya kegiatan penghindaran pajak. Namun jumlah komite audit tidak mempengaruhi terjadinya *tax avoidance*, melainkan bisa diketahui dari kualitas dan independensi komite audit dalam menganalisis adanya kegiatan *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut.⁵⁵

Pada setiap perusahaan yang dijadikan sampel pada penelitian ini, jumlah komite audit yang memiliki berkisar 3 sampai 4 anggota. Karena setiap perusahaan hanya diwajibkan memenuhi persyaratan yang diatur oleh badan pengawas pasar modal (BAPEPAM) yakni sebanyak 3 anggota yang diketahui oleh seorang dewan komisaris yang menjabat sebagai ketua komite audit tanpa memperhatikan tugas dan fungsi dalam perusahaan itu sendiri.⁵⁶

4.5.3 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan analisis yang dilakukan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sehingga hipotesis ketiga ditolak yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lustina Rima Masrurroch, Dkk

⁵⁵ Noor Mita Dewi, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016," *Maksimum* 9, no. 1 (2019): 40.

⁵⁶ Nur Fadrijh. Saputra, Moses Dicky Refa; Asyik, "Pengaruh Profitability, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 8 (2017): 1–19.

(2021), Friska Atika Saputri (2018), Eka Murni Lusiana Wati Dan Susi Astuti (2020), Hendrik Maula (2019) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Intan (2019), Sugiyanto dan Juwita Ramadani Fitria (2019) yang menyatakan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Jumlah aset besar yang perusahaan miliki tidak mempengaruhi adanya kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menggunakannya untuk kepentingan perusahaan seperti menunjang operasional perusahaan yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa.

Hasil yang diperoleh penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi yang memiliki asumsi bahwa setiap manusia mementingkan kepentingannya sendiri. Manajemen (*agent*) dalam teori agensi akan berusaha melakukan perencanaan pajak agar perusahaan memiliki ETR rendah yang diindikasikan meningkatkan penghindaran pajak. Semakin tinggi intensitas modal yang dimiliki perusahaan, maka beban depresiasi semakin meningkat. Namun beban depresiasi yang disebabkan aktiva tetap yang tidak memiliki pengaruh terhadap pengurangan beban pajak perusahaan. Walaupun perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi, bukan berarti sengaja menyimpan aset tetap tersebut untuk melakukan kegiatan penghindaran pajak, melainkan akan digunakan untuk keperluan operasional perusahaan dimasa mendatang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independent, komite audit dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta *Islamic Index* (JII) tahun 2016-2021. Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dewan komisaris independent tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti banyak atau sedikitnya jumlah anggota dewan komisaris independent yang dimiliki oleh perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Komite audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Intensitas modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa beban penyusutan yang ada dalam aset tetap perusahaan tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan anatara lain sebagai berikut:

1. Peneliti mempunyai keterbatasan pada objek penelitian, yakni beberapa perusahaan tidak konsisten menerbitkan saham di Jakarta *Islamic Index* tahun 2016-2021.
2. Nilai koefisiensi determinasi pada penelitian ini sebesar 0,019 yang berarti variabel dewan komisaris independent, komite audit dan

intensitas modal memiliki pengaruh sebesar 1,9% terhadap *tax avoidance*, sisanya sebesar 98,1 % merupakan variabel lain yang tidak masuk pada penelitian ini.

3. Terdapat perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam menerbitkan laporan keuangannya, sehingga tidak dapat dianalisis.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini dapat diperluas dengan memasukkan variable atau indikator lainnya sebagai prediktor terhadap *tax avoidance* pada penelitian selanjutnya, sehingga akan menghasilkan hasil yang lebih bervariasi dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.
2. Penelitian ini menggunakan populasi penelitian pada perusahaan yang terdaftar pada JII, dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan populasi penelitian atau mengubah objek penelitian menjadi perusahaan yang terdaftar di BEI atau di JII 70.
3. Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian lainnya dengan alat ukur yang berbeda.
4. Agar perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan, pemerintah hendaknya membuat peraturan perpajakan yang jelas mengenai penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantari, P. R., and IGK A. Ulupui. "Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 16, no. 1 (2016): 702–732.
- Dwiyanti, Ida Ayu Intan, and I Ketut Jati. "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 27 (2019): 2293.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Fitasari, Anis Nur. "Pengaruh Islamic Corporate Governance (ICG) Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tax Avoidance (Studi Penelitian Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2018)" (2020): 1–130.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Ichsan, Nurul. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina* 19, no. No.2 (2018): 75–91.
- Indriawati, Welly Florentia. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating." *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi* (2017): 1–81.
- Irawan, Yanuar, Havid Sularso, and Yusriati Nur Farida. "Analisis Atas Penghindaran Pajak." *Soedirman Accounting Review* 02, no. 02 (2017): 114–127.
- James, Oyadonghan Kereotu, and Emmanuel Igbo Igbeng. "Corporate Governance , Shareholders Wealth Maximization and Tax Avoidance." *Research Journal of Finance and Accounting* 5, no. 2 (2014): 127–130.
- Kemenkeu. "UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan." *Pravoslavie.ru* 2000 (2007).
- Al Lawati, Hidayat, and Khaled Hussainey. "Risk and Financial Management: Do Overlapped Audit Committee Directors Affect Tax Avoidance?" *Journal of Risk and Financial Management*, no. 14 (2021): 487. <https://doi.org/10.3390/jrfm14100487>.
- Maula, Hendrik. "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013 – 2017)" (2019): 1–114.
- Mita Dewi, Noor. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan

- Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016.” *Maksimum* 9, no. 1 (2019): 40.
- Muadz Rizki Muzakki, Darsono. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 4, no. 1 (2015): 1–8.
- Murni, Yetty, Eka Sudarmaji, and Eneng Sugihyanti. “The Role of Institutional Ownerships , Board of Independent Commissioner and Leverage : Corporate Tax Avoidance in Indonesia.” *IOSR Journal of Business and Management Ver . I* 18, no. 11 (2016): 2319–7668.
- Prasetyo, Irwan. Pramuka, Bambang Agus. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018): 1–15.
- Pratomo, Dudi, and Risa Aulia Rana. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.” *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8, no. 1 (2021): 91–103.
- Putri, Tiara Riza Falistiani. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-2015” (2017).
- Ratih Puspita, Silvia, and Puji Harto. “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.” *Diponegoro Journal of Accounting* 3, no. 2 (2014): 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Riziqiyah, Metiya Fatikhatur, and Bambang Agus Pramuka. “The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia.” *Journal of Economy* 21, no. 1 (2021): 9–18.
- Saputra, Moses Dicky Refa; Asyik, Nur Fadjrih. “Pengaruh Profitability, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6, no. 8 (2017): 1–19.
- Setianingsih, Desi Puspitasari. “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Listing Di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2020)” (2021): 6.
- Sugiyanto, S, and J R Fitria. “The Effect Karakter Eksekutif, Intensitas Modal, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor” *Proceedings Universitas ...* (2019): 447–461.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.
- . *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2017): 166–177.

Swingly, Calvin, and I Made Sukartha. "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1 (2015): 47–62.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Variabel Dewan Komisaris Independen

NO	Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Komisaris Independen	Total Komisaris Perusahaan	PKI
1	AKRA	2016	1	4	0.25
2	ICBP	2016	3	6	0.5
3	INDF	2016	3	8	0.375
4	KLBF	2016	3	7	0.4285714
5	PTBA	2016	1	6	0.1666667
6	TLKM	2016	3	7	0.4285714
7	UNTR	2016	2	6	0.3333333
8	UNVR	2016	4	5	0.8
9	AKRA	2017	1	3	0.3333333
10	ICBP	2017	3	6	0.5
11	INDF	2017	3	8	0.375
12	KLBF	2017	3	7	0.4285714
13	PTBA	2017	1	6	0.1666667
14	TLKM	2017	4	7	0.5714286
15	UNTR	2017	2	6	0.3333333
16	UNVR	2017	4	5	0.8
17	AKRA	2018	1	3	0.3333333
18	ICBP	2018	3	6	0.5
19	INDF	2018	3	8	0.375
20	KLBF	2018	2	6	0.3333333

21	PTBA	2018	1	6	0.1666667
22	TLKM	2018	3	7	0.4285714
23	UNTR	2018	2	6	0.3333333
24	UNVR	2018	4	5	0.8
25	AKRA	2019	1	3	0.3333333
26	ICBP	2019	3	6	0.5
27	INDF	2019	3	8	0.375
28	KLBF	2019	3	7	0.4285714
29	PTBA	2019	1	6	0.1666667
30	TLKM	2019	4	6	0.6666667
31	UNTR	2019	2	6	0.3333333
32	UNVR	2019	4	5	0.8
33	AKRA	2020	1	3	0.3333333
34	ICBP	2020	3	6	0.5
35	INDF	2020	3	8	0.375
36	KLBF	2020	3	7	0.4285714
37	PTBA	2020	1	6	0.1666667
38	TLKM	2020	4	9	0.4444444
39	UNTR	2020	2	6	0.3333333
40	UNVR	2020	5	6	0.8333333
41	AKRA	2021	1	3	0.3333333
42	ICBP	2021	3	6	0.5
43	INDF	2021	3	8	0.375
44	KLBF	2021	3	7	0.4285714
45	PTBA	2021	1	6	0.1666667

46	TLKM	2021	4	6	0.6666667
47	UNTR	2021	2	6	0.3333333
48	UNVR	2021	5	6	0.8333333

Lampiran 2 Data variabel komite audit

NO	Nama Perusahaan	Tahun	Jumlah Komite Audit
1	AKRA	2016	3
2	ICBP	2016	3
3	INDF	2016	3
4	KLBF	2016	3
5	PTBA	2016	3
6	TLKM	2016	6
7	UNTR	2016	3
8	UNVR	2016	3
9	AKRA	2017	3
10	ICBP	2017	3
11	INDF	2017	3
12	KLBF	2017	3
13	PTBA	2017	3
14	TLKM	2017	6
15	UNTR	2017	3
16	UNVR	2017	3
17	AKRA	2018	3
18	ICBP	2018	3
19	INDF	2018	3

20	KLBF	2018	3
21	PTBA	2018	3
22	TLKM	2018	5
23	UNTR	2018	3
24	UNVR	2018	3
25	AKRA	2019	3
26	ICBP	2019	3
27	INDF	2019	3
28	KLBF	2019	3
29	PTBA	2019	4
30	TLKM	2019	5
31	UNTR	2019	3
32	UNVR	2019	3
33	AKRA	2020	3
34	ICBP	2020	3
35	INDF	2020	3
36	KLBF	2020	3
37	PTBA	2020	4
38	TLKM	2020	7
39	UNTR	2020	3
40	UNVR	2020	3
41	AKRA	2021	3
42	ICBP	2021	3
43	INDF	2021	3
44	KLBF	2021	3

45	PTBA	2021	4
46	TLKM	2021	6
47	UNTR	2021	3
48	UNVR	2021	4

Lampiran 3 Data variabel intensitas modal

NO	Nama Perusahaan	Tahun	Total Aset Tetap	Total Aset	Intensitas Modal
1	AKRA	2016	4,561,738,403	15,830,740,710	0.288156978
2	ICBP	2016	7,114,288	28,901,948	0.246152543
3	INDF	2016	35,126,820	82,699,635	0.424751814
4	KLBF	2016	4,555,756,101,580	15,226,009,210,657	0.29920881
5	PTBA	2016	6,087,746	18,576,774	0.327707383
6	TLKM	2016	114,498	179,611	0.63747766
7	UNTR	2016	12,072,399	63,991,229	0.188657089
8	UNVR	2016	9,529,476	16,745,695	0.5690702
9	AKRA	2017	4,214,694,189	16,823,208,531	0.250528559
10	ICBP	2017	8,120,254	31,619,514	0.256811474
11	INDF	2017	39,492,287	88,400,877	0.446740896
12	KLBF	2017	5,342,659,713,054	16,616,239,416,335	0.321532423
13	PTBA	2017	6,199,299	21,987,482	0.281946746
14	TLKM	2017	130,171	198,484	0.655826162
15	UNTR	2017	16,374,852	82,262,093	0.19905708
16	UNVR	2017	10,422,133	18,906,413	0.551248563
17	AKRA	2018	4,921,528,198	19,940,850,599	0.246806332
18	ICBP	2018	10,741,622	34,367,153	0.312554898

19	INDF	2018	42,388,236	96,537,796	0.439084356
20	KLBF	2018	6,252,801,150,475	18,146,206,145,369	0.344578977
21	PTBA	2018	6,547,586	24,172,933	0.270864359
22	TLKM	2018	143,248	206,196	0.694717647
23	UNTR	2018	24,584,551	116,281,017	0.211423598
24	UNVR	2018	10,627,387	19,522,970	0.544352985
25	AKRA	2019	5,325,172,386	21,409,046,173	0.248734686
26	ICBP	2019	11,342,412	38,709,314	0.293015061
27	INDF	2019	43,072,504	96,198,559	0.447745834
28	KLBF	2019	7,666,314,692,908	20,264,726,862,584	0.378308316
29	PTBA	2019	7,272,751	26,098,052	0.278670262
30	TLKM	2019	156,973	221,208	0.709617193
31	UNTR	2019	27,469,005	111,713,375	0.245888239
32	UNVR	2019	10,715,376	20,649,371	0.518920213
33	AKRA	2020	5,126,119,370	18,683,572,815	0.274365049
34	ICBP	2020	13,351,296	103,588,325	0.128888038
35	INDF	2020	45,862,919	163,136,516	0.281132147
36	KLBF	2020	8,157,762,093,280	22,564,300,317,374	0.361534015
37	PTBA	2020	7,863,615	24,056,755	0.326877628
38	TLKM	2020	160,923	246,943	0.651660505
39	UNTR	2020	24,319,373	99,800,963	0.243678741
40	UNVR	2020	10,419,902	20,534,632	0.507430666
41	AKRA	2021	4,978,381,223	23,508,585,736	0.21176864
42	ICBP	2021	14,175,833	118,066,628	0.120066383
43	INDF	2021	46,751,821	179,356,193	0.26066466

44	KLBF	2021	7,994,022,263,626	25,666,635,156,271	0.311455795
45	PTBA	2021	8,321,231	36,123,703	0.230353765
46	TLKM	2021	165,026	277,184	0.595366255
47	UNTR	2021	20,456,694	112,561,356	0.181738162
48	UNVR	2021	10,102,086	19,068,532	0.529777856

Lampiran 4 Data variabel Tax avoidance

No	Nama Perusahaan	Tahun	Pembayaran Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	CETR
1	AKRA	2016	756,061,134	1,118,546,845	0.67593
2	ICBP	2016	1,530,642	4,989,254	0.30679
3	INDF	2016	2,678,358	7,385,228	0.36266
4	KLBF	2016	752,684,488,364	3,091,188,460,230	0.24349
5	PTBA	2016	695,330	2,733,799	0.25435
6	TLKM	2016	11,304	38,189	0.296
7	UNTR	2016	2,028,487	6,730,030	0.30141
8	UNVR	2016	2,066,894	8,571,885	0.24112
9	AKRA	2017	943,192,500	1,126,408,644	0.83734
10	ICBP	2017	1,862,383	5,206,561	0.3577
11	INDF	2017	3,422,799	7,594,822	0.45068
12	KLBF	2017	782,316,500,559	3,241,186,725,992	0.24137
13	PTBA	2017	1,120,852	6,101,629	0.1837
14	TLKM	2017	11,846	42,659	0.27769
15	UNTR	2017	2,033,517	10,522,657	0.19325
16	UNVR	2017	2,406,049	9,371,661	0.25674
17	AKRA	2018	633,604,204	868,080,622	0.72989

18	ICBP	2018	2,005,525	6,446,785	0.31109
19	INDF	2018	3,460,973	7,446,966	0.46475
20	KLBF	2018	838,106,813,718	3,306,399,669,021	0.25348
21	PTBA	2018	2,284,395	6,799,056	0.33599
22	TLKM	2018	10,375	36,405	0.28499
23	UNTR	2018	3,877,972	116,281,017	0.03335
24	UNVR	2018	2,340,586	12,185,764	0.19208
25	AKRA	2019	348,823,672	865,379,704	0.40309
26	ICBP	2019	1,615,934	7,436,972	0.21728
27	INDF	2019	2,361,672	8,749,397	0.26992
28	KLBF	2019	839,509,478,376	3,402,616,824,533	0.24672
29	PTBA	2019	1,532,563	5,455,162	0.28094
30	TLKM	2019	10,348	37,908	0.27298
31	UNTR	2019	6,842,083	15,476,885	0.44208
32	UNVR	2019	3,120,471	9,901,772	0.31514
33	AKRA	2020	672,041,964	1,191,716,906	0.56393
34	ICBP	2020	1,684,628	9,958,647	0.16916
35	INDF	2020	2,784,615	12,426,334	0.22409
36	KLBF	2020	602,524,461,985	3,627,632,574,744	0.16609
37	PTBA	2020	661,821	3,231,685	0.20479
38	TLKM	2020	11,452	38,775	0.29534
39	UNTR	2020	3,347,588	7,011,186	0.47746
40	UNVR	2020	1,693,036	9,206,869	0.18389
41	AKRA	2021	1,266,735,679	1,395,063,019	0.90801
42	ICBP	2021	2,817,278	9,935,232	0.28356

43	INDF	2021	3,577,269	14,456,085	0.24746
44	KLBF	2021	967,557,071,735	4,143,264,634,774	0.23353
45	PTBA	2021	1,307,229	10,358,675	0.1262
46	TLKM	2021	9,679	43,678	0.2216
47	UNTR	2021	2,826,391	14,462,250	0.19543
48	UNVR	2021	1,848,151	7,496,592	0.24653

Lampiran 5

*Uji Statistik Deskriptif***Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	48	0.17	0.83	0.4316	0.18527
Komite Audit	48	3	7	3.44	0.987
Intensitas Modal	48	0.120	0.710	0.36139	0.157597
Tax Avoidance	48	0.033	0.908	0.31836	0.173599
Valid N (listwise)	48				

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.16841382
Most Extreme Differences	Absolute	0.173
	Positive	0.173
	Negative	-0.101
Test Statistic		0.173
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.001 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Normalitas Setelah di Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

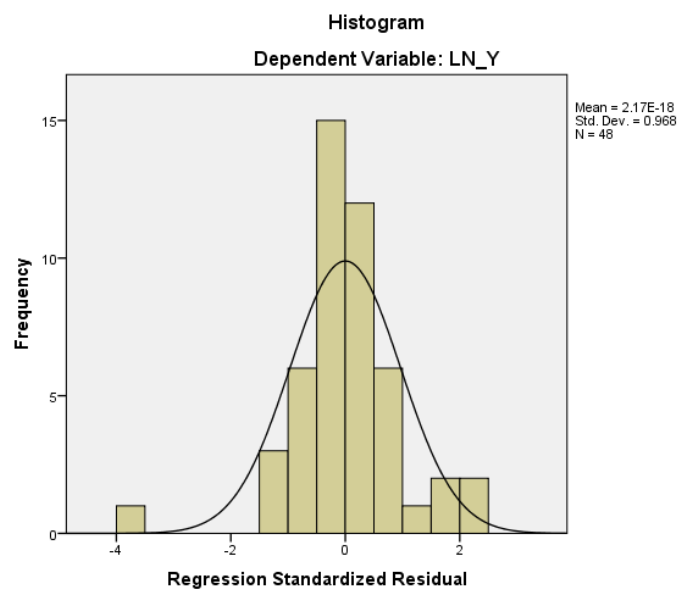
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.52044062
Most Extreme Differences	Absolute	0.120
	Positive	0.120
	Negative	-0.119
Test Statistic		0.120
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.079 ^c

a. Test distribution is Normal.

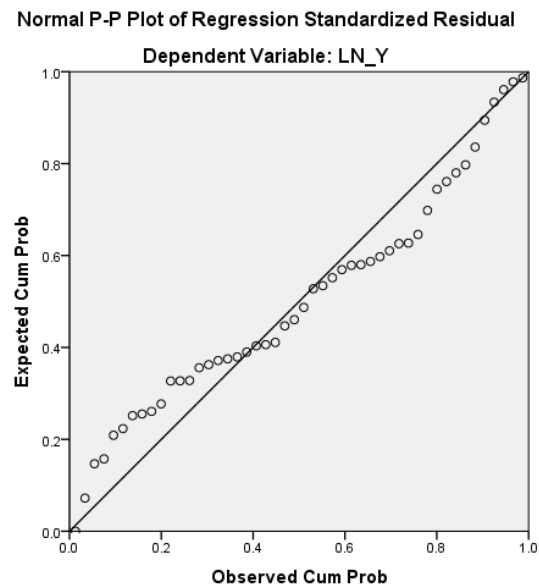
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Uji Normalitas: Grafik Histogram



Uji Normalitas: Grafik Normal P-Plot



Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0.798	0.679		-1.175	0.246		
	LN_X1	-0.126	0.203	-0.106	-0.618	0.539	0.760	1.315
	LN_X2	-0.335	0.426	-0.146	-0.788	0.435	0.647	1.546
	LN_X3	0.167	0.251	0.138	0.666	0.509	0.519	1.928

a. Dependent Variable: LN_Y

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.137 ^a	0.019	-0.048	0.53789	1.808

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

b. Dependent Variable: LN_Y

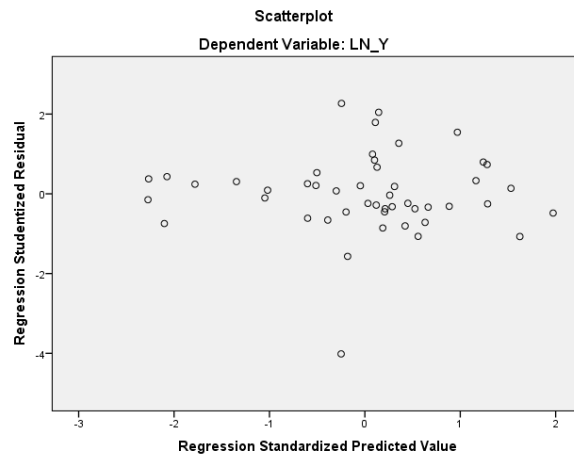
Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.798	0.679		-1.175	0.246
	LN_X1	-0.126	0.203	-0.106	-0.618	0.539
	LN_X2	-0.335	0.426	-0.146	-0.788	0.435
	LN_X3	0.167	0.251	0.138	0.666	0.509

a. Dependent Variable: LN_Y

Uji Heteroskedastisitas



Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.798	0.679		-1.175	0.246
	LN_X1	-0.126	0.203	-0.106	-0.618	0.539
	LN_X2	-0.335	0.426	-0.146	-0.788	0.435
	LN_X3	0.167	0.251	0.138	0.666	0.509

Dependent Variable: LN_Y

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.245	3	0.082	0.282	0.838 ^b
	Residual	12.730	44	0.289		
	Total	12.975	47			

a. Dependent Variable: LN_Y

b. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

Uji Koefisien Determinasi (R²)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.137 ^a	0.019	-0.048	0.53789	1.808

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X1, LN_X2

Dependent Variable: LN_Y

Uji Signifikansi Individual (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0.798	0.679		-1.175	0.246		
	LN_X1	-0.126	0.203	-0.106	-0.618	0.539	0.760	1.315

LN_X2	-0.335	0.426	-0.146	-0.788	0.435	0.647	1.546
LN_X3	0.167	0.251	0.138	0.666	0.509	0.519	1.928

Dependent Variable: LN_Y

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Elsa Rahma Prameswari
Tempat dan Tanggal Lahir : Pemalang, 8 Agustus 2000
Alamat : Desa Cibelok Kledung Rt 04 Rw 05 Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nomor Hp : 081327319218
Email : elsarahmaprameswari@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

SD Negeri 04 Cibelok
SMP Negeri 2 Taman
SMA Negeri 2 Pemalang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Desember 2022

Elsa Rahma Prameswari

Nim: 1805046036

